

**DAMPAK ASEAN – HONG KONG FREE TRADE AGREEMENT  
TERHADAP PERDAGANGAN DAN INVESTASI DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen  
Ilmu Hubungan Internasional*

**Disusun oleh:**

**NURBAKTI HARISALDI**

**E061191049**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI**

**DAMPAK ASEAN – HONG KONG FREE TRADE AGREEMENT  
TERHADAP PERDAGANGAN DAN INVESTASI DI INDONESIA**

Disusun dan diajukan oleh :

**NURBAKTI HARISALDI**

E061191049

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemenn*

*Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universitas Hasanuddin*

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DAMPAK ASEAN-HONG KONG FREE TRADE AGREEMENT  
TERHADAP PERDAGANGAN DAN INVESTASI DI  
INDONESIA

N A M A : NURBAKTI HARISALDI

N I M : E061191049

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 1 Maret 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,

Prof. H. Darwis, MA, Ph.D  
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II

Aswin Baharuddin, S.IP, MA.  
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :  
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,



Aswin Baharuddin, S.IP, MA.  
NIP. 198607032014041002

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DAMPAK ASEAN-HONG KONG FREE TRADE AGREEMENT  
TERHADAP PERDAGANGAN DAN INVESTASI DI  
INDONESIA

N A M A : NURBAKTI HARISALDI

N I M : E061191049

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 29 Februari 2024.



Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NURBAKTI HARISALDI

NIM : E061191049

PROGRAM STUDI : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

JENJANG : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul :

### **DAMPAK ASEAN – HONG KONG FREE TRADE AGREEMENT TERHADAP PERDAGANGAN DAN INVESTASI DI INDONESIA**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Februari 2024

Yang Menyatakan



NURBAKTI HARISALDI

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala berkah, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Dampak ASEAN – Hong Kong Free Trade Agreement Terhadap Perdagangan dan Investasi di Indonesia” dengan baik, dan dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Tidak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW., yang telah mengantar kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini.

Selama melakukan penulisan skripsi, penulis juga tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Karena itu melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak M. Yani Mudair dan Ibu Diana, yang telah sabar membimbing dan mendukung penulis sampai di titik ini. Terima kasih untuk semua yang sudah diberikan kepada penulis. Semoga sehat dan bahagia selalu sampai di titik-titik hidup lain penulis. Dan semoga, selesainya skripsi ini bisa membuat kalian bangga kepada penulis.
2. Adik-adik penulis. Keisya, Aldiyan, Arga, terima kasih sudah memberikan tawa dan kasih sayang untuk penulis selama menyusun skripsi ini. Sehat selalu kalian bertiga, akur terus, dan semoga penulis bisa membuat kalian bangga.

3. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Prof. H. Darwis, M.A., Ph.D
4. Seluruh dosen, staff dan pegawai Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA., Bapak (Alm) Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Bapak Drs. Imran Hanafi, M.A., M.Ec., Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Bapak Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D, Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si., Bapak Ishaq Rahman, S.IP., M.Si., Ibu Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D., Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si., Kak Ashry Sallatu S.IP., M.Si., Kak Agussalim, S.IP., MIRAP. Kak Aswin Baharuddin, S.IP., MA., dan Kak Nurjannah Abdullah, S.IP., MA., Bapak Ridho dan Ibu Rahma serta Kak Salni. Terima kasih banyak atas segala ilmu dan bantuannya selama penulis berkuliah sebagai mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional.
5. Dosen Penasehat Akademik penulis Bapak Agussalim, S.IP., MIRAP. Terima kasih atas bimbingan dan perhatiannya kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Bapak Prof. H. Darwis, M.A., Ph.D selaku dosen pembimbing I dan Kak Aswin Baharuddin, S.IP., MA selaku dosen pembimbing II yang telah berkontribusi dalam memberikan saran, pengetahuan, bimbingan dan arahan sejak awal penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas segala dukungan dan bimbingan serta arahan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

10. Para pegawai dan staff akademik Fakultas yang telah membantu penulis dalam segala proses administratif selama masa perkuliahan.
11. HIMAHFI FISIP UNHAS, rumah sekaligus tempat berproses penulis selama menjadi mahasiswa. Semoga selalu menjadi rumah dan ruang belajar bagi anak HI selama di kampus. Untuk semua yang pernah penulis dapati selama di rumah ini, terima kasih sebesar-besarnya.
12. Bentor, yang diisi oleh Uta dan Muflih. Terima kasih telah menemani penulis hingga hari ini, semoga kendaraan ini bisa terus melaju sampai ke hal-hal baik di masa depan untuk kita bertiga. Terkhusus untuk Muflih, semangat menyelesaikan tugas akhirnya. Penulis yakin perayaan atas kemenganganmu akan berada di waktu yang tepat, dan itu sebentar lagi.
13. Teman-teman seperjuangan. Uga, Riswan, Ucy, Nanda, Alip yang selalu membersamai penulis dalam menyusun tugas akhir ini. Semoga semua cerita selama menyusun skripsi ini akan menjadi kenangan yang kita bicarakan nanti. Tidak lupa juga Kak Dito dan Kak Ucil, Terima kasih telah menjadi kakak bagi penulis selama di kampus. Semoga kalian berdua sehat dan bahagia selalu dengan kehidupan masing-masing.
14. Bassto. Kelompok kecil yang punya mimpi-mimpi besar. Cawang, Akbar, Daffa, Boges, Hadi, Aan, Pandu, Abdi, Farel, Dani. Terima kasih telah menjadi warna tersendiri bagi kehidupan penulis selama di kampus. Semoga mimpi kita semua bisa dirayakan suatu saat nanti. Dan untuk Iccang, penulis percaya mimpi-mimpi besar dan baikmu akan

segera menjadi kenyataan. Semoga kita semua kembali dalam keadaan yang semakin baik.

15. HISTORIA 19 yang telah menemani dan berjuang bersama-sama sedari menjadi mahasiswa baru hingga pada menyelesaikan proses studinya. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu.

16. Kaori, Asep, Rahmat, Ruslan, Fahri, Bang Izul, Kak Agung dan Kak Rizki. Terima kasih telah membiarkan penulis berkembang di rumah ini. Untuk semua pengertiannya selama proses penyelesaian skripsi ini, penulis sangat berterima kasih. Semoga kalian sehat selalu.

17. KKN 108 Desa Umpungeng. Chanas, Widya, Tuti, Refa, Rahma, Lisda, Fiqri, dan Yasir. Untuk semua hal menyenangkan di Jolle, penulis berterima kasih banyak. Semoga kita bisa kumpul kembali dan menceritakan hari-hari menyenangkan itu.

18. Adik-adik Angkatan 2020 Iqbal, Cunnu, Eca, Aliyah, Alya, Amirah, Auni, Balqis, Anes, Oni, Ius, Alfreda, Alifa, Uga, Reul, Aula, Cacac, Yaya, dan Syawal. Untuk adik-adik 2021 Odi, Harun, Azis, Ijul, Rahma, Didi, Pute, Ardana, Ery, Hesnia, Jesika, Resky Rahim, Aan, Jill, Alya, Caca, Naya, Naurah, Suci, dan Ara. Untuk adik-adik 2022 Athilla, Opu, Ilham, Zaki, Ogi, Nuna, Pudut, Warda, Marwah, Lede, Pute, Sry, Qilan, Qayla, Agi, Lutfi, Zaki, Falbas dan adik-adik lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menjadi bagian dari kehidupan penulis di kampus. Selamat belajar dan berproses di kampus untuk kalian semua. Terkhusus, terima kasih

banyak buat Onel yang telah menemani dan berproses bersama selama menjadi DPO periode 2022-2023 kemarin, tetap semangat kedepannya. Semoga janji nasi padangnya bisa segera direalisasikan.

19. Ningrum. Terima kasih telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk semua bantuannya dan semangatnya selama penulisan ini, penulis ucapkan terima kasih. Semoga hidupmu lancar dan semua cita-citamu segera tercapai.

Makassar, 1 Maret 2024

Nurbakti Harisaldi

## ABSTRAK

**Nurbakti Harisaldi**, E061191049. “Dampak ASEAN – Hong Kong Free Trade Agreement Terhadap Perdagangan dan Investasi di Indonesia”, di bawah bimbingan **Prof. H. Darwis, MA, Ph.D** selaku pembimbing I dan **Bapak Aswin Baharuddin, S.IP, MA** selaku pembimbing II, pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Penelitian ini mengeksplorasi dampak Perjanjian Perdagangan Bebas Asean-Hong Kong (AHKFTA) terhadap perdagangan dan investasi di Indonesia. Dengan menggunakan kerangka analisis diplomasi ekonomi dan perjanjian perdagangan bebas (FTA), penelitian ini menjelaskan diplomasi ekonomi Indonesia terhadap Hong Kong dan dampak AHKFTA terhadap Indonesia. Dengan menggunakan metodologi tinjauan literatur, temuan penelitian ini menggarisbawahi bahwa dalam memanfaatkan AHKFTA, pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia ke Hong Kong berfokus pada inklusivitas aktor dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi dan promosi perdagangan dan investasi. Implementasi diplomasi ekonomi ini adalah dengan memanfaatkan AHKFTA sebagai fasilitas perdagangan melalui pengurangan hambatan perdagangan. Kemudian, ditemukan juga bahwa selama berlakunya AHKFTA, volume perdagangan antara Indonesia dan Hong Kong mengalami peningkatan. Namun, neraca perdagangan Indonesia masih dominan defisit. Kemudian pada sektor investasi, selama berlakunya AHKFTA ditemukan bahwa investasi Hong Kong ke Indonesia mengalami peningkatan.

**Kata Kunci: AHKFTA, Diplomasi Ekonomi, Free Trade Agreement, Perdagangan, Investasi**

## **ABSTRACT**

**Nurbakti Harisaldi**, E061191049. "The Impact of the ASEAN - Hong Kong Free Trade Agreement on Trade and Investment in Indonesia", under the guidance of **Prof. H. Darwis, MA, Ph.D** as supervisor I and **Mr. Aswin Baharuddin, S.IP, MA** as supervisor II, at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This research explores the impact of the Asean-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA) on trade and investment in Indonesia. Using the framework of economic diplomacy and free trade agreement (FTA) analysis, this research explains Indonesia's economic diplomacy to Hong Kong and the impact of the AHKFTA on Indonesia. Using a literature review methodology, the findings of this study underline that in utilizing the AHKFTA, the implementation of Indonesia's economic diplomacy to Hong Kong focuses on the inclusiveness of actors in the implementation of economic diplomacy and trade and investment promotion. The implementation of this economic diplomacy is to utilize the AHKFTA as a trade facility through reducing trade barriers. Then, it was also found that during the enactment of the AHKFTA, the volume of trade between Indonesia and Hong Kong increased. However, Indonesia's trade balance is still dominantly deficit. Then in the investment sector, during the enactment of the AHKFTA, it was found that Hong Kong's investment into Indonesia had increased.

**Keywords: AHKFTA, Economic Diplomacy, Free Trade Agreement, Trade, Investment**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	IV
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	V
KATA PENGANTAR .....	VI
ABSTRAK .....	XI
ABSTRACT .....	XII
DAFTAR ISI.....	XIII
DAFTAR TABEL.....	XV
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4 Kerangka Konseptual & Definisi Operasional.....	8
1.4.1 Diplomasi Ekonomi .....	9
1.4.2 <i>Free Trade Agreement</i> (FTA).....	13
1.5 Metode Penelitian.....	16
1.5.1 Jenis Penelitian .....	16
1.5.2 Jenis & Metode Pengumpulan Data .....	17
1.5.3 Teknik Analisis Data .....	18
BAB II.....	19
2.1 Diplomasi Ekonomi .....	19
2.2 <i>Free Trade Agreement</i> (FTA) .....	28
2.3 Penelitian Terdahulu .....	34
BAB III.....	42
3.1 Hubungan Bilateral Indonesia – Hong Kong di Bidang Perdagangan dan Investasi.....	42
3.2 Profil ASEAN – <i>Hong Kong Free Trade Agreement</i> (AHKFTA) .....	51
3.3 Profil ASEAN – <i>Hong Kong Investment Agreement</i> (AHKIA) .....	55
BAB IV .....	58

4.1 Diplomasi Ekonomi Indonesia ke Hong Kong Dalam Memanfaatkan <i>ASEAN – Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA)</i> dan <i>ASEAN – Hong Kong Investment Agreement (AHKIA)</i> .....	59
4.2 Dampak <i>ASEAN – Hong Kong Free Trade Agreement</i> dan <i>ASEAN – Hong Kong Investment Agreement (AHKIA)</i> Terhadap Perdagangan dan Investasi di Indonesia .....	71
BAB V.....	81
5.1 Kesimpulan .....	81
5.2 Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	83

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Bagan Kerangka Konseptual .....	8
Tabel 2: Nilai Investasi Hong Kong ke Indonesia 2000-2005 .....	44
Tabel 3: Nilai Ekspor-Impor Indonesia ke Hong Kong 2016-2020 .....	44
Tabel 4: 5 Komoditas Ekspor Tertinggi Indonesia ke Hong Kong 2016-2020 ...	45
Tabel 5: Nilai Investasi Hong Kong ke Indonesia tahun 2016-2020 .....	45
Tabel 6: Jadwal Komitmen Penghapusan dan Pengurangan Tarif.....	54
Tabel 7: Data Perdagangan Indonesia - Hong Kong 2017-2023 .....	72
Tabel 8: Data ekspor migas dan non-migas Indonesia ke Hong Kong 2018-2023 .....	75
Tabel 9: Data 10 komoditas ekspor tertinggi Indonesia ke Hong Kong 2017-202 .....	77
Tabel 11: Nilai Investasi Hong Kong ke Indonesia 2017-2020.....	78

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

ASEAN merupakan sebuah organisasi regional di Asia Tenggara yang terdiri dari 11 negara. Salah satu alasan ASEAN terbentuk dikarenakan adanya ketakutan negara-negara asia tenggara akan besarnya potensi konflik mengenai batasan wilayah juga ketegangan dari perang dingin (Choiruzzad, 2014). Adanya ketakutan ini mendorong terbentuknya ASEAN dan terus ada hingga saat ini.

Kehadiran ASEAN bagi negara-negara asia tenggara kemudian ikut berperan dalam hal kerjasama ekonomi. ASEAN menghadirkan beberapa kerjasama ekonomi, terkhusus dalam hal pembukaan pasar yang lebih luas melalui kerjasama pasar bebas dengan beberapa negara. Hal ini tentunya sejalan dengan salah satu isi dari Deklarasi Bangkok (Deklarasi ASEAN) yakni mempercepat pembangunan ekonomi. (Kemenlu RI, 2015)

Keseriusan ASEAN dalam memajukan ekonomi regional dapat dilihat dengan dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA sendiri merupakan sebuah visi bersama ASEAN dalam mengintegrasikan pasar regionalnya yang memungkinkan perdagangan bebas produk dan jasa antar negara anggotanya. Pembentukan MEA sendiri dibentuk melalui 4 (empat) kerangka strategis, yakni pencapaian pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang merata, dan terintegrasi dengan ekonomi global (AEC COUNCIL INDONESIA, 2020). Dalam mencapai salah satu kerangka strategi MEA, yakni terintegrasi dengan ekonomi global,

ASEAN terus berusaha membangun kerjasama ekonomi dan atau perdagangan dengan negara-negara lain di luar anggota. Hal ini juga dapat dilihat sebagai bentuk keseriusan ASEAN dalam mencapai visi bersama mereka. Tidak heran, ASEAN kerap membangun beberapa kerja sama ekonomi, terkhusus perdagangan, dengan negara-negara lain seperti China, Korea, Hong Kong, Australia, dan beberapa lainnya.

Salah satu kerjasama ekonomi, mengenai pasar bebas, yang dibuat oleh ASEAN adalah kerjasama dengan China yakni *ASEAN-CHINA Free Trade Agreement* (ACFTA). Pembentukan mengenai perjanjian kerjasama antara ASEAN dan China dimulai pada 2000 hingga akhirnya terbentuk "*ASEAN-China Economic Comprehension*". Hingga akhirnya pada 2004 ditandatangani Perjanjian perdagangan barang dan 2007 ditandatangani Perjanjian perdagangan jasa oleh para pihak yang ikut dalam kerjasama ini. (ASEAN, 2015)

Perjanjian ini, melalui konsep pasar bebas, membuka kesempatan perdagangan internasional sebesar-besarnya antara negara anggota ASEAN dengan China. Menurut Sadono Sukirno, Perdagangan internasional sendiri memberikan beberapa manfaat bagi suatu negara yakni Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, Memperoleh keuntungan dari spesialisasi, Memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan transfer teknologi modern (Hasoloan, 2013). Maka melalui perjanjian ini, diharapkan masing-masing pihak bisa mendapatkan keuntungan.

Meski demikian, pada berjalannya ACFTA, nyatanya Indonesia tidak benar-benar diuntungkan oleh kerjasama ini. Bahkan beberapa penelitian

memberikan gambaran mengenai kerugian Indonesia selama berjalannya *agreement* ini. Berdasarkan *review* yang dituliskan oleh I Made Adnyana, skema perdagangan ACFTA tidak berjalan sesuai harapan. ACFTA malah memberikan dampak negatif terhadap ekspor Indonesia ke Tiongkok terutama pada beberapa komoditas ekspor “andalan” Indonesia. ACFTA tidak mampu meningkatkan ekspor Indonesia pada komoditas utama tetapi justru melemahkan pada komoditas tersebut (Adnyana, 2016).

Selain perjanjian pasar bebas yang dibuat dengan China, ASEAN juga melakukan kerjasama dengan negara-negara lain seperti Jepang , Korea Selatan, India, juga Australia-New Zealand. Namun sayangnya, dari semua kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia, kebanyakan tidak memberikan dampak yang diharapkan. Rasbin (2020), dalam tulisannya mengenai manfaat perjanjian perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia, menyimpulkan bahwa secara umum nilai perdagangan Indonesia setelah implementasi perdagangan internasional mengalami tren yang positif, namun kinerja neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit kecuali neraca perdagangan antara Indonesia dengan India.

Beberapa kerjasama Indonesia dalam lingkup regional yang dilakukan terlihat belum memberikan hasil yang cukup memuaskan. Tentu saja ini bukan tanpa sebab, faktor belum siapnya produk Indonesia untuk bersaing di pasar internasional menjadi salah satu alasan hal ini terjadi. Meskipun demikian, Indonesia tetap aktif dalam kerjasama-kerjasama internasional, terkhusus di regional ASEAN. Terbaru, Indonesia kembali ikut dalam kerjasama regional yang

dilakukan oleh ASEAN dan Hong Kong yakni *ASEAN - Hong Kong Free Trade Agreement*.

Pada 2017 ASEAN kembali membentuk sebuah kerjasama ekonomi dengan Hong Kong yang ditandatangani di Filipina. Kerjasama ini menjadi kerjasama ekonomi dalam hal pembukaan pasar yang lebih besar bagi kedua pihak melalui kebijakan pasar bebas. *ASEAN - Hong Kong Free Trade Agreement* (selanjutnya disebut AHKFTA) kemudian diratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN. Terhitung sejak 2019, beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Laos, Myanmar, Vietnam, Singapura, dan Thailand telah resmi memberlakukan perjanjian ini di negara masing-masing. Sedangkan untuk Indonesia, perjanjian ini baru mulai resmi berlaku pada 4 Juli 2020. (Indonesia, 2020)

Secara garis besar AHKFTA merupakan sebuah kerjasama ekonomi antara ASEAN dan Hong Kong yang berusaha menyederhanakan hambatan perdagangan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan pemotongan pada pos-pos tarif yang telah disepakati. Pemotongan pos tarif ini pun berbeda-beda di tiap negara yang ikut bergabung (ASEAN, 2018).

Indonesia, sebagai salah satu anggota ASEAN, ikut meratifikasi *ASEAN - Hong Kong Free Trade Agreement* (AHKFTA). Perjanjian ini selesai diratifikasi oleh Indonesia dengan ditandai keluarnya Perpres No. 34/2020 tentang Pengesahan *ASEAN Hong Kong, China Free Trade Agreement* (Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok). Setelah itu, Sekretariat ASEAN menerima piagam Pengesahan AHKFTA pada 5 Mei 2020 hingga akhirnya pada 4 Juli 2020 AHKFTA mulai berlaku bagi Indonesia (Indonesia, 2020).

Sebuah negara dinyatakan terikat pada sebuah perjanjian kerjasama apabila telah melakukan penandatanganan, pertukaran instrumen-instrumen, dan ratifikasi (Situngkir, 2018). Dengan diratifikasinya AHKFTA maka membuat Indonesia terikat pada perjanjian kerjasama ini. Hal ini kemudian akan berdampak kepada kegiatan perdagangan internasional Indonesia terkhusus dengan Hong Kong.

Indonesia dan Hong Kong memiliki hubungan yang baik dalam bidang ekonomi, terkhusus investasi. Dalam rangka memperkuat hubungan Indonesia dan Hong Kong, kedua negara ini memiliki skema *win-win outcomes*. Hong Kong memiliki peran dalam berkontribusi untuk masa depan Indonesia, maka dari itu Hong Kong menawarkan Indonesia Investor dan bisnis secara cuma-cuma untuk masuk ke China kemudian. Tawaran ini menjadikan Hong Kong sebagai gerbang bagi Indonesia untuk masuk ke dalam pasar China yang lebih besar (Hong Kong-ASEAN Foundation, 2023).

Selain aspek perdagangan, di waktu yang sama dibentuk juga sebuah perjanjian mengenai investasi antara ASEAN dan Hong Kong yakni *ASEAN - Hong Kong Investment Agreement* (selanjutnya disebut AHKIA). Perjanjian ini mengatur mengenai hal-hal terkait penanaman modal antara kedua pihak, yakni ASEAN dan Hong Kong. Perjanjian ini ditandatangani bersamaan dengan AHKFTA, yakni pada 2017 di Filipina (ASEAN , 2020).

Perjanjian ini akan memberikan kepastian hukum dan akses pasar yang lebih luas dalam perdagangan dan investasi bagi perusahaan-perusahaan dari negara anggota. Kedua perjanjian ini, AHKIA dan AHKFTA akan memberikan kepastian hukum dan akses pasar yang lebih luas dalam perdagangan dan investasi bagi

perusahaan-perusahaan Hong Kong. Mereka akan menciptakan peluang baru untuk bisnis dan meningkatkan arus perdagangan dan investasi antara Hong Kong dan ASEAN, termasuk, tentu saja, Indonesia, yang mewakili lebih dari sepertiga PDB kolektif ASEAN dan lebih dari 40 persen populasinya. (The Government of the Hong Kong Special Administrative Region, 2018)

Pembahasan masalah AHKFTA telah dibahas sebelumnya, salah satunya adalah tulisan Dian Dwi Laksani dan Aziza Rahmaniar Salam yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian Kerjasama Perdagangan Internasional. Laksani dan Salam, dalam tulisannya, mencoba untuk memperkirakan dampak dari *ASEAN - Hong Kong Free Trade Agreement* terhadap kinerja perdagangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *Computable General Equilibrium* (CGE) dengan data *Global Trade Analysis Project* (GTAP) dari Purdue University. Secara garis besar, penelitian ini melakukan sebuah simulasi penurunan tarif 50% dan 100% untuk melihat keuntungan yang didapatkan oleh setiap pihak. Melalui simulasi, hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa negara—negara di ASEAN terkena dampak yang berbeda-beda, entah itu dalam penurunan tarif 50% ataupun liberalisasi penuh (100%). Secara khusus, Indonesia sendiri, melalui simulasi pada penelitian, akan mendapatkan keuntungan jika liberalisasi yang dilakukan 100% (penuh) dibandingkan dengan hanya 50% (Laksani & Salam, 2016).

Keikutsertaan Indonesia dalam AHKFTA membuat perdagangan internasional Indonesia, terkhusus dengan Hong Kong, akan terkena dampak. Hal ini sebagai sesuatu yang menarik untuk diteliti apalagi melihat kerjasama serupa dengan negara lain memberikan dampak kepada Indonesia. Maka dari itu, penulis

memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak *ASEAN - Hong Kong Free Trade Agreement* Terhadap Perdagangan dan Investasi di Indonesia”.

## **1.2 Batasan dan Rumusan Masalah**

Pada penelitian ini, batasan akan dilakukan pada diplomasi ekonomi Indonesia ke Hong Kong dan nilai perdagangan Indonesia – Hong Kong serta nilai investasi Hong Kong yang masuk ke Indonesia. Dalam melihat diplomasi ekonomi Indonesia ke Hong Kong akan dibatasi pada periode 2020-2023. Hal ini untuk melihat diplomasi ekonomi apa saja yang dilakukan Indonesia ke Hong Kong setelah diberlakukannya *ASEAN - Hong Kong Free Trade Agreement* (AHKFTA) di Indonesia. Selanjutnya, untuk perdagangan dan investasi, penelitian ini akan membatasi pada tahun 2017-2023. Hal ini dilakukan untuk membandingkan pada 3 tahun sebelum dan setelah diberlakukannya *ASEAN - Hong Kong Free Trade Agreement* (AHKFTA) di Indonesia. Lebih spesifik, penelitian ini juga akan membatasi dalam melihat komoditas ekspor Indonesia ke Hong Kong pada peringkat 10 teratas. Maka dari itu, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini menjadi:

1. Bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia ke Hong Kong dalam memanfaatkan perjanjian *ASEAN - Hong Kong Free Trade Agreement*?
2. Bagaimana dampak pemberlakuan *ASEAN - Hong Kong Free Trade Agreement* terhadap perdagangan dan investasi di Indonesia?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

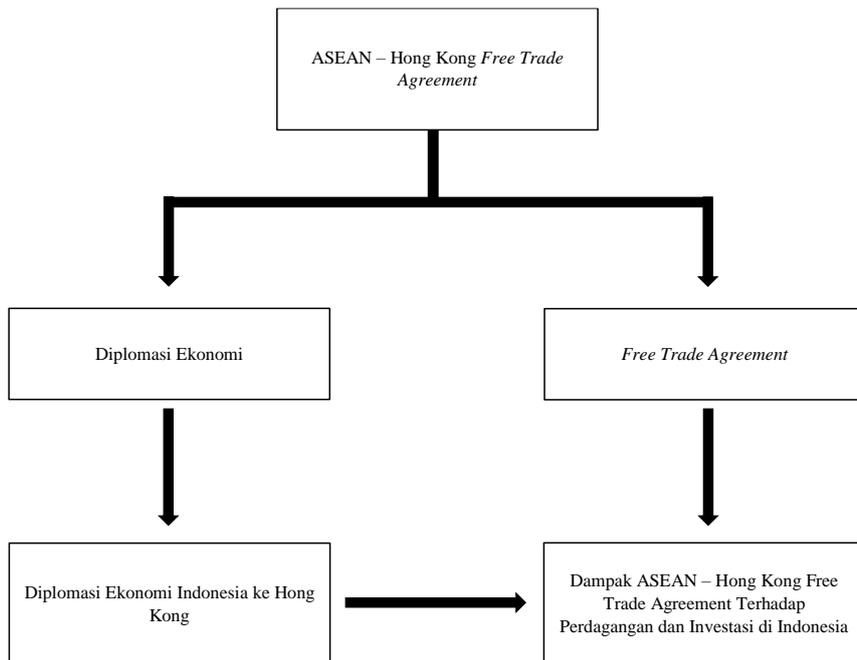
Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis diplomasi ekonomi Indonesia ke Hong Kong dalam memanfaatkan perjanjian *ASEAN - Hong Kong Free Trade Agreement*.
2. Untuk menganalisis dampak pemberlakuan *ASEAN - Hong Kong Free Trade Agreement* terhadap perdagangan dan investasi di Indonesia.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan manfaat dalam keilmuan HI mengenai isu ekonomi terkhusus dalam hal perdagangan internasional.
2. Dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki isu serupa.

#### 1.4 Kerangka Konseptual & Definisi Operasional



Tabel 1: Bagan Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menggunakan 2 konsep dalam menganalisis kasus yang diambil. Konsep yang digunakan adalah diplomasi ekonomi dan perjanjian perdagangan bebas. Penjelasan lebih lanjut akan dijabarkan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Diplomasi Ekonomi**

Diplomasi ekonomi merupakan kegiatan atau interaksi antara sebuah negara dengan negara lainnya. Layaknya bentuk diplomasi lain, diplomasi ekonomi hadir guna mencapai kepentingan nasional suatu negara terkhusus dalam bidang ekonomi. Diplomasi ekonomi memiliki asumsi dan menjalankan strategi yang sama dengan praktek diplomasi pada umumnya (Killian, 2012). Pelaksanaan diplomasi ekonomi pun sedikit banyak memiliki kesamaan dengan bentuk diplomasi lainnya, dimana negara melalui utusannya dalam negara lain ataupun utusan langsung dari Ibukota negara yang melakukan praktik diplomasi ini.

Sebagai sebuah bentuk diplomasi, praktik diplomasi ekonomi mengambil peran yang besar bagi sebuah negara dalam menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Selain itu, diplomasi ekonomi juga hadir guna menjawab kepentingan nasional dari sebuah negara. Pelaksanaan diplomasi ekonomi menjadi sebuah alat bagi sebuah negara guna mencapai kepentingan nasionalnya dalam bidang ekonomi. Diplomasi ekonomi kemudian menjadi senjata penting bagi negara-negara untuk dapat bekerjasama ataupun berkonflik di sistem internasional (Killian, 2012). Relasi ekonomi antara negara dalam dunia internasional juga ikut menjadi

sebuah dampak yang akan terasa dari hasil diplomasi ekonomi yang dilakukan.

Meskipun memiliki kemiripan dengan bentuk diplomasi pada umumnya, diplomasi ekonomi memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya. Tantangan yang dimaksud adalah kekuatan pasar. Salah satu karakter utama dari diplomasi ekonomi adalah bahwa diplomasi ekonomi sangat sensitif dan reaktif terhadap perubahan dan perkembangan pasar (Bayne & Woolcock, 2007). Tantangan pasar ini juga menjadi satu faktor yang harus diperhatikan oleh negara. Selain itu, pelaksanaan diplomasi ekonomi juga memiliki perbedaan lain dimana aktor diplomasi bukan lah serta merta hanya negara saja. Sektor privat juga harus diikutkan dalam pembuatan dan perumusan sebuah diplomasi ekonomi yang dilakukan dikarenakan mereka juga memiliki peran yang cukup besar.

Pada buku yang ditulis oleh Nicholas Bayne dan Stephen Woolcock mengenai diplomasi ekonomi, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan guna meningkatkan kinerja diplomasi ekonomi yakni *relative economic power*, lembaga & aturan internasional, kondisi pasar, persaingan kepentingan domestik negara, dan ide-ide (Bayne & Woolcock, 2007). Seperti yang sudah dikatakan pada paragraf sebelumnya, kondisi pasar menjadi sebuah faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi. Selain itu, hal lainnya yang juga ikut menjadi faktor penunjang keberhasilan diplomasi ekonomi harus diperhatikan dalam penyusunan dan perumusan strategi diplomasi ekonomi suatu negara.

Senada dengan Bayne dan Woolcock, Kishan S. Rana juga menjabarkan mengenai beberapa faktor yang dapat mensukseskan diplomasi ekonomi. Pertama, pelaksanaan kegiatan ekonomi di luar negeri harus lebih melibatkan aktor non-negara. Kedua, mengintegrasikan urusan luar negeri dan manajemen ekonomi eksternal. Ketiga, menjadikan promosi ekspor dan mobilisasi asing ke dalam negeri sebagai tujuan utama dalam diplomasi ekonomi. Keempat, mengikutsertakan lembaga lain dalam pembentukan dan perumusan kerja sama. Kelima, memaksimalkan jaringan diplomatik di luar negeri (Rana, 2007).

Diplomasi ekonomi menjadi lebih luas terkhusus semenjak era Globalisasi. Donna dan Brian menjabarkan beberapa fokus pelaksanaan diplomasi ekonomi pada era globalisasi sekarang ini. Pada tulisannya, mereka menjabarkan bahwa ada 4 fokus diplomasi ekonomi, yakni diplomasi komersial, diplomasi perdagangan, diplomasi keuangan, dan layanan konsuler visa (Lee & Hocking, 2010).

Perdagangan internasional menjadi sebuah praktik yang sangat marak dilaksanakan dalam dunia internasional hari ini. Berbagai macam bentuk perdagangan dilakukan oleh negara-negara baik secara bilateral maupun multilateral, juga baik secara negara maupun kawasan. Kegiatan perdagangan internasional sendiri hadir dalam rangka memenuhi kebutuhan domestik suatu negara. Suatu negara tidak dapat memenuhi kepentingan domestiknya sendiri, maka melalui perdagangan internasional kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi itu diakomodir. Suatu negara yang

membutuhkan negara lain kemudian berubah menjadi saling ketergantungan satu sama lain diantara negara (Rinaldy, Ikhlas, & Utama, 2018).

Diplomasi perdagangan sendiri merupakan sebuah proses negosiasi dan pengambilan keputusan dalam hubungan perdagangan dan perjanjian kerja sama. Diplomasi perdagangan seringkali dianggap sebagai *zero sum game* yang berupa tawar-menawar antara negara-negara yang memiliki aktor rasional demi mendapatkan konsesi maksimal (Lee & Hocking, 2010). Diplomasi perdagangan menjadi sebuah praktik dan penjabaran lebih spesifik dari diplomasi ekonomi dalam memastikan tercapainya kepentingan nasional suatu negara.

Indonesia hari ini sedang masuk dalam sebuah perjanjian kerjasama pasar bebas antara ASEAN dengan Hong Kong. Keikutsertaan Indonesia pada perjanjian ini menjadi sebuah fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dalam meningkatkan hubungan ekonominya dengan Hong Kong, terkhusus dalam hal perdagangan dan investasi. Sesuai dengan penelitian ini, dimana penulis mencoba melihat dampak yang dihasilkan dari kerja sama perdagangan AHKFTA terhadap perdagangan dan investasi di Indonesia.

Kemudian, konsep ini akan membantu dalam menganalisis lebih lanjut mengenai diplomasi ekonomi Indonesia ke Hong Kong setelah diberlakukannya AHKFTA di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan mengkontekstkan konsepsi mengenai hal-hal yang dapat mengoptimalkan

diplomasi ekonomi menurut pendapat Rana(2007). Kemudian, akan dijabarkan mengenai diplomasi ekonomi Indonesia ke Hong Kong dalam rangka peningkatan perdagangan Indonesia – Hong Kong dan investasi Hong Kong ke Indonesia.

#### **1.4.2 *Free Trade Agreement (FTA)***

Pelaksanaan perdagangan internasional yang dilakukan antar negara mengantarkan pemahaman kepada suatu konsep lain yang membantu dalam melihat fenomena internasional, yakni perdagangan bebas. Perdagangan bebas menjadi sebuah konsep yang sejalan dengan pelaksanaan perdagangan internasional. Sebuah pelaksanaan perdagangan internasional sendiri hadir untuk menjawab beberapa kepentingan negara, seperti meningkatkan perekonomian dan memenuhi *supply* kebutuhan domestik. Hal-hal ini pun hanya dapat dilakukan apabila sebuah negara membuka kran pasarnya kepada negara lain, dan begitu juga sebaliknya. Suatu negara yang membutuhkan negara lain kemudian berubah menjadi saling ketergantungan satu sama lain diantara negara (Rinaldy, Ikhlas, & Utama, 2018)

Hal penting dalam perdagangan adalah bahwa di dalam suatu negara, industri yang berbeda lebih produktif daripada yang lain. Tidak dapat dihindari bahwa setiap negara memiliki industri dengan produktivitas yang lebih tinggi dari rata-rata dan lebih rendah dari rata-rata. Karena industri dengan produktivitas tinggi di suatu negara hanya perlu membayar upah pasar yang kompetitif di negara tersebut, maka industri tersebut akan

memiliki biaya relatif lebih rendah dan dapat bersaing di pasar dunia. Prinsip ini merupakan dasar dari perdagangan (Gould, Ruffin, & Woodbridge, 1993)

Perbedaan produktivitas antar negara dalam melakukan produksi pada sebuah komoditas mengantarkan negara-negara untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang saling terintegrasi. Pelaksanaan integrasi ekonomi ini pun dilaksanakan melalui beberapa model, mulai dari internasional, regional, hingga pada hubungan bilateral. Melalui ekonomi yang saling terintegrasi, dibentuk sebuah pasar bersama yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas produksi negara, yang kemudian berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Menurut Gerber (2013) dalam tulisan Estupinan, proses integrasi ekonomi dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas merupakan langkah bagi negara-negara untuk menikmati pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan manfaat lain dari globalisasi ekonomi (Estupinan, 2017)

Selama tiga dekade terakhir, *Free Trade Agreement (FTA)* telah menjadi bagian integral dan abadi dari sistem perdagangan global. Jumlah FTA yang terlapor pada organisasi perdagangan dunia meningkat dari 19 pada tahun 1990 menjadi 292 pada Januari 2019. Menurut definisi *free trade agreement (FTA)* merupakan perjanjian antara dua atau lebih negara dimana semua tarif dihapuskan untuk barang-barang yang diproduksi di negara-negara anggota sementara tarif perdagangan dengan negara-negara non-anggota dipertahankan (Athukorala, 2019)

Bagwell dan Staiger (1999), berpendapat bahwa perjanjian perdagangan dirancang untuk menghilangkan ketidakefisienan (biaya transaksi yang tinggi) dalam perdagangan internasional, akibatnya pemerintah-pemerintah anggota dapat memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi kepada penduduknya (Estupinan, 2017). Adanya perjanjian perdagangan yang membuka pasar antar negara membuat negara-negara dengan biaya produksi yang lebih rendah dapat masuk ke pasar negara lain sehingga nilai ekspor negara yang lebih rendah dapat meningkatkan penjualan komoditasnya kepada negara lain.

Kemudian, menurut Urata (2002), pelaksanaan suatu perjanjian perdagangan bebas memiliki dampak yang dapat mempengaruhi negara baik anggota maupun non-anggota. Urata (2002) memaparkan dua efek yang dihasilkan dari FTA yakni efek statis dan efek dinamis. Efek statis terdiri dari 3 bagian, sedangkan efek dinamis terdiri dari 2 bagian.

Efek statis yang dimaksudkan terdiri *trade creation effect*, *trade diversion effect*, dan *term of trade effect*. Sedangkan efek dinamis terdiri dari *the market expansion effect* dan *the competition enhancement effect*. Salah satu efek yang disampaikan oleh Urata (2002), yakni *Trade creation effect*, merupakan efek dimana terciptanya perdagangan antar anggota suatu kelompok dengan menghilangkan hambatan perdagangan diantara mereka. Dengan kata lain, melalui penghapusan hambatan memungkinkan terjadinya peningkatan perdagangan diantara negara anggota FTA.

Selain itu, Urata (2002) juga mengatakan bahwa FTA juga berdampak kepada investasi negara anggota suatu FTA. Jika pasar intra-regional yang besar tercipta sebagai akibat dari penghapusan hambatan melalui FTA, investasi yang ditujukan untuk penjualan di pasar intra-regional tersebut akan mengalir masuk. FTA juga memberi dampak dalam bidang investasi yang disebut *investment diversion effect*, yaitu mengalihkan investasi dari negara non-anggota ke negara anggota (Urata, 2002).

Pada penelitian ini, konsep FTA yang dikatakan oleh Urata (2002) akan menjadi landasan bagi penulis dalam melihat pelaksanaan AHKFTA di Indonesia. Berdasarkan yang dikatakan Urata (2002), sebuah FTA dapat memberikan *trade creation effect* untuk perdagangan dan *investment diversion effect* untuk investasi. Maksud dari kedua efek tersebut adalah pelaksanaan FTA dapat memberikan dampak peningkatan pada perdagangan dan investasi bagi negara anggota. Maka dari itu, konsepsi mengenai dampak AHKFTA yang dikatakan oleh Urata (2002) akan menjadi landasan awal bagi penulis kemudian dalam melihat data perdagangan dan investasi Indonesia – Hong Kong.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Dalam menganalisis permasalahan yang telah diuraikan diatas, akan digunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pada dasarnya penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan

menginterpretasikan sesuatu, misalnya situasi dan kondisi dengan hubungan yang ada, pendapat-pendapat yang berkembang, akibat atau efek yang terjadi dan sebagainya (Rusandi & Rusli, 2021). Maka dari itu, jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai tindakan-tindakan dari diplomasi ekonomi Indonesia ke Hong Kong serta dalam melihat dampak dari *ASEAN – Hong Kong Free Trade Agreement* terhadap perdagangan Indonesia – Hong Kong dan investasi Hong Kong yang masuk ke Indonesia.

### **1.5.2 Jenis & Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini akan menggunakan metode *library research* atau studi pustaka dalam melakukan pengumpulan data. Metode studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut (Adlini & dkk, 2022). Melalui metode pengumpulan data ini, maka data yang akan digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari buku, dokumen, laporan, maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Data-data tersebut akan diperoleh di perpustakaan Universitas Hasanuddin, perpustakaan Departemen HI Universitas Hasanuddin, dan perpustakaan HIMAH FISIP UNHAS. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan data dari internet dengan mengakses web lembaga/kementerian yang terkait dengan objek penelitian ini.

### **1.5.3 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini akan menganalisis data dengan teknik kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1984), analisis data kualitatif adalah analisis dekriptif dimana data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan secara kualitatif, dengan titik tekan pada penjelasan hubungan kausalitas antara variabel indikator. Akan tetapi, dalam hal tertentu perlu didukung oleh data kuantitatif berupa tabel sederhana (Suparman, 2020). Melalui teknik ini, penelitian akan dilakukan dengan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai diplomasi ekonomi yang dilakukan Indonesia ke Hong Kong. Selain itu, teknik ini membantu dalam memperlihatkan dampak *ASEAN – Hong Kong Free Trade Agreement* pada perdagangan Indonesia – Hong Kong dan investasi Hong Kong yang masuk ke Indonesia dengan bantuan tabel mengenai data perdagangan dan investasi yang akan dipaparkan nantinya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Diplomasi Ekonomi**

Globalisasi memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan perekonomian di dunia. Proses terintegrasinya dunia melalui globalisasi mengantarkan banyak aspek dalam dunia internasional yang berkembang dengan pesat, aspek ekonomi salah satunya. Pergeseran fokus negara-negara di dunia yang berubah, dari pertahanan keamanan ke ekonomi politik, sedikit banyak diiringi dan dipengaruhi oleh proses globalisasi. Ekonomi sekarang ini menjadi aspek yang paling banyak diperhatikan oleh negara-negara di dunia. Dalam menjaga kekuatan dan eksistensi di dunia internasional, negara-negara mulai memperbanyak kerjasama baik secara bilateral, regional, maupun multilateral dalam bidang ekonomi.

Sebuah konsep dan praktik yang belakangan banyak digunakan negara untuk mencapai kepentingan ekonominya adalah diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi adalah proses di mana negara-negara menangani dunia luar untuk memaksimalkan keuntungan nasional mereka di semua bidang kegiatan, termasuk perdagangan, investasi dan bentuk lain dari pertukaran yang menguntungkan secara ekonomi, di mana mereka memanfaatkan keunggulan komparatif ketika memiliki ubungan bilateral, regional dan multilateral, yang masing-masing penting (Rana, 2007).

Diplomasi ekonomi menjadi sebuah pembicaraan yang banyak dibicarakan di dunia internasional. Banyak pendapat dan definisi yang coba dibuat oleh para

akademisi maupun praktisi dalam bidang diplomasi ekonomi. Luasnya batasan dari diplomasi ekonomi pun menghadirkan beberapa perspektif mengenai diplomasi ekonomi. Definisi yang komprehensif tentang diplomasi ekonomi akan melihatnya sebagai istilah umum yang mengacu pada penggunaan sarana politik sebagai pengaruh dalam hubungan internasional dengan tujuan meningkatkan kemakmuran ekonomi nasional, dan penggunaan pengaruh ekonomi untuk meningkatkan stabilitas politik suatu negara (Okano-Heijmans, *Economic Diplomacy*, 2018). Dari definisi yang dikatakan Heijmans, sebuah diplomasi ekonomi dilihat bukan hanya sebagai sebuah kegiatan ekonomi tetapi juga sebuah kegiatan politik yang dilakukan oleh suatu negara.

Pada definisi yang lain, Geoff R. Bridge dan Alan James (2011) mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai 1)Diplomasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kebijakan ekonomi, dan 2)Diplomasi yang menggunakan sumber daya ekonomi, baik sebagai imbalan maupun sanksi, untuk mencapai suatu tujuan kebijakan luar negeri tertentu. (Okano-Heijmans, 2011). Diplomasi ekonomi dalam hal ini, lebih dilihat sebagai sebuah praktik politik negara dalam mencapai tujuannya. Adapun aspek ekonomi hadir sebagai alat/senjata yang digunakan dalam melakukan diplomasi. Melihat hal ini, aspek ekonomi dan politik menjadi tidak terpisahkan di dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi.

Definisi yang dihadirkan pada beberapa penjelasan sebelumnya memiliki persamaan dalam mendefinisikan diplomasi ekonomi, yakni diplomasi ekonomi dilihat sebagai sebuah kegiatan ekonomi politik internasional suatu negara. Kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat ekonomi seperti promosi perdagangan &

investasi dan pembukaan pasar yang lebih luas guna meningkatkan perdagangan antar negara. Sedangkan, kegiatan diplomasi ekonomi yang lebih bersifat politik seperti mempengaruhi pihak lain melalui keterlibatan dalam bantuan ekonomi dalam hal pembangunan ataupun kerja sama ekonomi hingga pada tindakan yang bersifat sanksi seperti embargo ataupun boikot. (Okano-Heijmans, *Economic Diplomacy*, 2018). Pelaksanaan diplomasi ekonomi sangat bergantung pada aspek ekonomi dan politik. Masing-masing saling memberi pengaruh dan menopang satu sama lain dalam mencapai tujuan melalui diplomasi ekonomi. Maka dari itu, pembahasan mengenai diplomasi ekonomi tidak hanya dilihat sebagai sebuah pembahasan ekonomi saja tetapi lebih ke arah ekonomi politik.

Ketika pemerintah secara aktif menekankan kembali diplomasi ekonomi dalam kebijakan luar negeri mereka, terdapat kecenderungan umum untuk mengembangkan hubungan yang lebih kuat antara tiga untaian diplomasi ekonomi yakni diplomasi komersil, diplomasi perdagangan, dan kerja sama pembangunan. Ketiga diplomasi ini cenderung dilihat terpisah hingga tahun 1990-an, ketika negara-negara maju di barat sebagian besar mendominasi ukuran ekonomi dan politik global (Okano-Heijmans, *Economic Diplomacy*, 2018). Belakangan, kegiatan komersil, perdagangan, dan bantuan ekonomi mulai dilihat sebagai satu kesatuan dalam bingkai diplomasi ekonomi.

Diplomasi komersil sendiri merupakan sebuah kegiatan diplomatik yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain dengan tujuan mempromosikan perdagangan, investasi, dan pariwisata negaranya sekaligus memberikan intelijen/informasi mengenai peluang dan kondisi ekonomi negara

yang dituju. Diplomasi komersil telah ada sejak pertama kali lembaga-lembaga negara mengambil peran fasilitator pertukaran perdagangan yang dilakukan di luar negeri oleh para pedagang dan pengusaha (Rana, 2011). Melalui diplomasi komersil, agen diplomatik suatu negara di negara tujuan ikut membantu para pengusaha domestik dalam menjalin kerjasama ataupun melakukan aktifitas ekonomi di negara tujuannya.

Diplomasi perdagangan adalah praktik diplomatik yang bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi antar dua negara atau lebih melalui penguatan kegiatan perdagangan. Diplomasi perdagangan melibatkan berbagai tindakan dan strategi, seperti negosiasi perdagangan, kesepakatan investasi, penghapusan hambatan perdagangan, dan promosi perdagangan (Moenardy, Santoso, Saputera, Muttaqin, & Dewi, 2023). Pelaksanaan diplomasi perdagangan sebagai salah satu diplomasi ekonomi bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan melalui peningkatan ekspor barang atau jasa nasional.

Dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi, aktor-aktor yang ikut berperan di dalamnya cukup beragam. Negara, sebagai sebagai salah satu aktor, mengambil peran paling besar dan paling sentral dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi. Meski demikian aktor non-negara pun memiliki peran yang besar dalam perumusan strategi hingga pengimplementasian suatu diplomasi ekonomi. Aktor non-negara yang terlibat antara lain perusahaan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi dagang, dan lainnya. Diplomasi ekonomi tidak dapat dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dari konteks domestik (baik negara asal maupun negara

tujuan) dan aktivitas negara dipengaruhi oleh aktor-aktor lain, seperti bisnis swasta dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya (Okano-Heijmans, 2011).

Besarnya peran negara dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi tidak terlepas dari kekuatan politik yang dimiliki oleh negara. Negosiasi mengenai kerjasama ekonomi lebih aktif dilakukan oleh negara sebagai pemilik power politik yang lebih besar dibandingkan aktor lain. Kehadiran aktor non-negara sendiri jarang memiliki suara yang signifikan dalam proses perumusan suatu perjanjian kerja sama. Meski demikian, aktor non-negara tetap memiliki peran yang besar dalam pengimplementasian dan mengarahkan bagaimana diplomasi ekonomi akan dilaksanakan. Tekanan-tekanan dari aktor non-negara akan selalu dilakukan karena aktor ini juga memiliki kepentingan dalam diplomasi ekonomi, terkhusus perusahaan swasta. Meskipun negara adalah aktor utama dan dengan demikian merupakan inti dari proses ini, banyak aktor lain yang memiliki suara dalam (apa yang pada akhirnya menjadi) kebijakan luar negeri dan ekonomi (Okano-Heijmans, 2011).

Keterlibatan dan keaktifan aktor negara dan non-negara dalam mensukseskan diplomasi ekonomi sangatlah penting. Sinergitas antara kedua aktor ini diperlukan dalam rangka tercapainya tujuan diplomasi ekonomi suatu negara. Tetapi hal ini bukan lah satu-satunya faktor yang dapat mensukseskan diplomasi ekonomi.

Paling tidak, menurut Rana (2007), ada 5 hal yang menjadi bahan utama untuk menyukseskan diplomasi ekonomi:

**1. Pelaksanaan kegiatan ekonomi di luar negeri harus melibatkan aktor non-negara.**

Keterlibatan ekonomi di luar negeri harus melibatkan berbagai macam elemen, bukan hanya kementerian luar negeri ataupun kementerian perdagangan dan investasi saja (Rana, 2007). Beberapa negara telah secara proaktif menjangkau para aktor non-negara dan mengkooptasi mereka demi kemajuan kepentingan ekonomi di luar negeri, melalui mekanisme formal dan informal. Aktor-aktor non-negara ini seperti organisasi dagang, pengusaha di luar negeri, ataupun kelompok-kelompok bisnis lainnya. Contoh: kelompok penasihat yang terdiri dari para pengusaha untuk memandu penjangkauan ekonomi eksternal dan mobilisasi investasi asing; kerja sama bilateral resmi yang didorong oleh asosiasi bisnis dan industri; kelompok pemikir dan cendekiawan yang bekerja dengan para pemimpin bisnis untuk memberikan nasihat tentang negosiasi perdagangan bebas. Keterlibatan aktor non-negara dalam diplomasi ekonomi menjadi hal yang perlu diperhitungkan. Peran-peran yang diambil oleh aktor non-negara dalam melaksanakan diplomasi ekonomi dapat memberikan jangkauan yang lebih luas. Selain itu, aktor non-negara di luar negeri juga menjadi perpanjangan lidah dalam melakukan promosi-promosi untuk Indonesia.

**2. Mengintegrasikan urusan luar negeri dan manajemen ekonomi eksternal**

Struktur urusan luar negeri dan manajemen ekonomi eksternal perlu diintegrasikan atau diselaraskan. Hal ini, secara garis besar, ditandai dengan

tiga cara. Pertama, menggabungkan urusan luar negeri dengan perdagangan eksternal. Kedua, membentuk mekanisme koordinasi khusus untuk menangani pekerjaan ekonomi eksternal, seperti pengawasan gabungan. Ketiga, mempercayakan promosi perdagangan dan investasi kepada lembaga khusus. Negara-negara yang tidak melakukan praktik ini cenderung menghabiskan banyak upaya untuk sengketa wilayah yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi bilateral dan tugas-tugas multilateral, mereka juga tidak memanfaatkan jaringan diplomatik luar negerinya dengan maksimal dalam rangka mengeksploitasi perdagangan dan investasi luar negeri (Rana, 2007). Beberapa negara berkembang tidak menggabungkan urusan luar negeri dan perdagangan dikarenakan beberapa alasan. Alasan yang mungkin terjadi dikarenakan beban institusional dari sistem tradisional yang menghalangi eksperimen. Alasan lain yang mungkin terjadi karena di negara tersebut kementerian perdagangan menjalankan fungsi manajemen perdagangan dalam negeri yang penting, hal ini membuat kementerian gabungan menjadi kurang menarik. Poin penting dari poin Rana pada bagian ini adalah urusan luar negeri dan ekonomi eksternal haruslah terintegrasi. Hal ini berarti tidak melulu hanya soal integrasi badan/divisi/kementerian, tapi lebih ke arah penggabungan tugas kerja kepada organisasi yang menangani urusan luar negeri.

### **3. Menjadikan promosi ekspor dan mobilisasi investasi asing ke dalam negeri sebagai tujuan utama dalam diplomasi ekonomi.**

Promosi ekspor melibatkan bantuan kepada perusahaan-perusahaan komersial dalam negeri untuk mencari pasar luar negeri melalui studi pasar,

kunjungan delegasi bisnis, partisipasi dalam pameran perdagangan internasional, dan pertemuan pembeli-penjual merupakan beberapa perangkat standar untuk membantu para eksportir dimana lembaga-lembaga resmi dapat memainkan peran sebagai fasilitator (Rana, 2007). Selanjutnya, pelaksanaan mobilisasi investasi asing dapat diawali dengan menjangkau calon investor asing, menyadarkan mereka tentang peluang di negara asal, lalu setelah itu melakukan promosi yang ditargetkan. Singkatnya, bagian awal difokuskan untuk menarik perusahaan asing melakukan investasi, dan bagian selanjutnya bertujuan untuk menerjemahkan niat/ketertarikan investor asing menjadi tindakan/investasi. Kegiatan '*salesmanship*' oleh badan-badan resmi selalu bergantung pada harmonisasi yang erat dengan asosiasi bisnis dan perusahaan-perusahaan individu.

#### **4. Mengikutsertakan lembaga lain dalam pembentukan dan perumusan kerja sama.**

Pembuatan kerangka kerja sama dilakukan oleh pemerintah dan dibantu oleh kamar dagang, lembaga pemikir dan cendekiawan, dengan tujuan menciptakan kondisi yang memajukan perdagangan dan investasi (Rana, 2007). Badan-badan ekonomi dalam negeri dan jaringan diplomatik harus secara pro-aktif mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi prioritas, dan menegosiasikan perjanjian-perjanjian yang diperlukan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Instrumen yang tersedia meliputi: perjanjian perdagangan bebas dan perdagangan preferensial (secara bilateral maupun multilateral), perjanjian yang mengatasi hambatan non-tarif,

perjanjian pengapalan dan transportasi lainnya, dan perjanjian perlindungan&fasilitasi investasi. Pada bagian ini, kementerian ekonomi dan kementerian luar negeri merupakan pra syarat untuk tindakan yang efektif. Selain pengaturan lembaga dalam negeri, penglibatan jaringan diplomatik dapat membantu pelaksanaan advokasi dan negosiasi ekonomi agar berjalan dengan optimal.

#### **5. Memaksimalkan jaringan diplomatik di luar negeri.**

Pelaksanaan diplomasi ekonomi yang beroperasi di luar ibu kota negara dengan diplomasi ekonomi di lapangan (jaringan kedutaan dan konsulat) harus lah bisa dibedakan. Konsulat tidak lagi hanya berperan pada perlindungan konsuler dan fasilitasi visa saja namun juga berperan dalam mempromosikan ekonomi dan perdagangan dari negara asalnya (Rana, 2007). Diplomasi ekonomi tidak lagi hanya menunggu kegiatan-kegiatan formal pada forum-forum ekonomi saja, namun diplomasi ekonomi harus lebih aktif dengan memanfaatkan aktor-aktor di lapangan. Pada bagian ini kementerian luar negeri memiliki peran yang sangat penting, hal ini dikarenakan jaringan-jaringan diplomatik negara dan konsulat dibawah langsung oleh kementerian luar negeri. Kuasa ini membuat kementerian luar negeri memiliki posisi terbaik untuk memobilisasi mereka. Maka dari itu, meminggirkan kementerian luar negeri dalam penjangkauan diplomasi ekonomi suatu negara hanya akan merugikan negara tersebut dalam melakukan diplomasi ekonomi.

Konsep diplomasi ekonomi dalam penelitian ini akan membantu melakukan analisis terkait rumusan masalah yang dipaparkan pada bab

sebelumnya. Lebih spesifik, konsep dari Rana (2007) mengenai hal-hal yang dapat mengoptimalkan diplomasi ekonomi akan membantu penulis dalam menguraikan kegiatan maupun strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan maupun strategi ini sebagai hal-hal yang dimaksudkan untuk mencapai target-target pemerintah Indonesia terutama dalam persoalan perdagangan dan investasi.

## ***2.2 Free Trade Agreement (FTA)***

Sebuah pelaksanaan perdagangan internasional hadir untuk menjawab beberapa kepentingan negara, seperti meningkatkan perekonomian dan memenuhi *supply* kebutuhan domestik. Hal-hal ini pun hanya dapat dilakukan apabila sebuah negara membuka kran pasarnya kepada negara lain, dan begitu juga sebaliknya. Suatu negara yang membutuhkan negara lain kemudian berubah menjadi saling ketergantungan satu sama lain diantara negara (Rinaldy, Ikhlas, & Utama, 2018).

Hal penting dalam perdagangan adalah bahwa di dalam suatu negara, industri yang berbeda lebih produktif daripada yang lain. Tidak dapat dihindari bahwa setiap negara memiliki industri dengan produktivitas yang lebih tinggi dari rata-rata dan lebih rendah dari rata-rata. Karena industri dengan produktivitas tinggi di suatu negara hanya perlu membayar upah pasar yang kompetitif di negara tersebut, maka industri tersebut akan memiliki biaya relatif lebih rendah dan dapat bersaing di pasar dunia. Prinsip ini merupakan dasar dari perdagangan (Gould, Ruffin, & Woodbridge, 1993).

Perbedaan produktivitas antar negara dalam melakukan produksi pada sebuah komoditas mengantarkan negara-negara untuk membangun sebuah sistem

ekonomi yang saling terintegrasi. Menurut Gerber (2013) dalam tulisan Estupinan, proses integrasi ekonomi dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas merupakan langkah bagi negara-negara untuk menikmati pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan manfaat lain dari globalisasi ekonomi (Estupinan, 2017). Melalui ekonomi yang saling terintegrasi, dibentuk sebuah pasar bersama yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan efektivitas produksi negara, yang kemudian berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara.

*Free Trade Agreement* (selanjutnya disebut FTA) merupakan sebuah perjanjian antara dua atau lebih negara dimana semua tarif dihapuskan untuk barang-barang yang diproduksi di negara-negara anggota sementara tarif perdagangan dengan negara-negara non-anggota dipertahankan (Athukorala, 2019). Athukorala memaparkan bahwa sebuah FTA hadir sebagai sebuah perjanjian antar negara dengan tujuan penghapusan hambatan perdagangan. Penghapusan hambatan ini pun kemudian diharapkan dapat memantik peningkatan aktifitas pasar yang lebih besar antara negara-negara anggota perjanjian.

Dalam pendapat lain, Arthur O'Sullivan dan Steven M. Sheffrin (2003) mengatakan bahwa *Free Trade Agreement* (FTA) adalah perjanjian menyangkut kerja sama antara dua negara atau lebih untuk mengurangi hambatan perdagangan (seperti kuota impor dan tarif) dan untuk meningkatkan perdagangan barang dan jasa antar negara satu dengan negara lainnya yang terlibat perjanjian (Mangunsong, 2017). Senada dengan Athukorala, definisi mengenai FTA yang dipaparkan pun merujuk kepada perjanjian dengan tujuan pengurangan hambatan perdagangan

antar negara. Hambatan yang dimaksud dapat berupa hambatan tarif maupun non-tarif.

FTA sendiri memiliki beberapa bentuk kerja sama bila dilihat dari jenis dan jumlah aktornya. Urata (2002) menyebutkan paling tidak ada 3 bentuk FTA yang paling sering dilakukan, yaitu **1)** Jumlah negara yang bertanda tangan adalah 2 negara dan pihak yang terlibat keduanya adalah negara. **2)** Jumlah negara yang bertanda tangan lebih dari 2 dan pihak yang bertanda tangan semuanya adalah negara, dan **3)** Jumlah negara yang bertanda tangan adalah lebih dari 2 dan pihak yang bertanda tangan terdiri dari organisasi kerja sama internasional (terdiri dari beberapa negara) dan pihak yang lain merupakan satu atau lebih negara (Estupinan, 2017).

Selain yang disebutkan di atas, pelaksanaan perdagangan bebas juga dapat dilakukan dalam bentuk perdagangan bilateral, regional, hingga multilateral. Perdagangan bilateral merupakan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara. Perdagangan regional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan yang sama, biasanya ditandai dengan adanya organisasi kawasan yang membawahnya. Sedangkan untuk perdagangan multilateral merupakan perdagangan yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara lintas kawasan, biasanya dibawah oleh rezim GATT (*General Agreement on Trade and Tarrifs*) ataupun dibawah oleh organisasi WTO (*World Trade Organizaton*).

Pelaksanaan FTA yang dibawah oleh WTO sendiri kurang menjadi pilihan oleh negara-negara di dunia internasional. Alasan dari hal ini sendiri dijelaskan oleh Urata(2002) dalam tulisannya yang menguraikan alasan-alasan pelaksanaan FTA di

tingkat kawasan lebih dipilih dibandingkan yang dibawah oleh WTO. **1)** Perjanjian FTA memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan liberalisasi perdagangan di bawah WTO. **2)** Meningkatnya kekuatan pengunjuk rasa anti-globalisasi yang memandang liberalisasi perdagangan di bawah WTO sebagai dampak buruk globalisasi. **3)** Keanggotaan di WTO yang terlalu banyak membuat lebih sulit menetapkan peraturan untuk isu-isu baru. **4)** Negara-negara berkeinginan untuk memperkuat pengaruh politik dan ekonomi mereka di arena internasional (Urata, 2002). Untuk diperhatikan, FTA pada paragraf ini yang dirujuk dari Urata adalah pelaksanaan FTA di dalam regionalisme/kawasan.

Melonjaknya pembentukan FTA di dunia bukan tanpa alasan, paling tidak ada 2 faktor yang memotivasi negara-negara untuk melakukan FTA yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang dimaksud adalah meningkatnya peluang ekspor bagi perusahaan domestik dengan menghilangkan hambatan perdagangan antar negara peserta (Urata, 2002). Akses terhadap pasar dan perluasan peluang ekspor sangat penting bagi perusahaan perusahaan dari negara kecil. Melalui perluasan pasar, peluang ekspor dapat meningkat dan membuat produksi yang dilakukan oleh perusahaan mengalami peningkatan dari segi jumlah dan efisiensi.

Selanjutnya, faktor internal meliputi pertumbuhan ekonomi yang berasal dari peningkatan efisiensi akibat besarnya persaingan dikarenakan dibukanya pasar (Urata, 2002). Pembukaan pasar membuat pasar semakin kompetitif dikarenakan banyaknya produk yang tersebar di pasar. Persaingan yang ketat di pasar membuat

perusahaan-perusahaan yang kurang efisien akhirnya keluar dari pasar digantikan oleh perusahaan-perusahaan yang lebih efisien.

Pelaksanaan suatu perjanjian perdagangan bebas memiliki dampak yang dapat mempengaruhi negara baik anggota maupun non-anggota. Urata (2002) memaparkan dua efek yang dihasilkan dari FTA yakni efek statis dan efek dinamis. Efek statis terdiri dari 3 bagian, yakni:

- 1) *Trade creation effect* merupakan efek dimana terciptanya perdagangan antar anggota suatu kelompok dengan menghilangkan hambatan perdagangan diantara mereka.
- 2) *Trade diversion effect* merupakan efek dimana impor dialihkan dari negara non-anggota yang lebih efisien ke negara anggota yang mungkin kurang efisien.
- 3) *Term of trade effect* merupakan kondisi perdagangan anggota ditingkatkan karena meningkatnya pengaruh mereka terhadap non-anggota sebagai akibat dari peningkatan volume perdagangan antar negara anggota.

Lalu, untuk efek dinamis sendiri meliputi:

- 1) *The market expansion effect* merupakan sebuah pencapaian skala ekonomi dan kemampuan untuk memilih lokasi terbaik untuk produksi dan distribusi seiring dengan dihilangkannya hambatan perdagangan dan perluasan pasar.
- 2) *The competition enhancement effect* yakni fasilitasi produksi yang efisien karena perusahaan yang kurang mendominasi di satu wilayah menjadi lebih kompetitif melalui integrasi pasar.

Beberapa literatur serupa juga menjelaskan mengenai dampak dari FTA. Seperti sebuah penelitian oleh Romalis (2007), penelitian yang dihasilkan menemukan bahwa FTA mempunyai dampak yang besar terhadap volume perdagangan internasional, namun tidak memiliki pengaruh yang terlalu besar terhadap harga dan kesejahteraan (Krishna, 2012). Dampak dari FTA dapat dilihat mulai dari volume perdagangan hingga kesejahteraan masyarakat di suatu negara.

Pada sisi yang lain, sebuah FTA juga dapat memberikan peluang bagi investor-investor asing untuk berinvestasi pada negara yang ikut dalam FTA. Bentuk investasi yang dilakukan sering dikenal sebagai *Foreign Direct Investment* (selanjutnya disebut FDI). FDI sendiri menurut Todaro (2000) merupakan dana-dana investasi yang langsung digunakan untuk menjalankan kegiatan bisnis atau mengadakan alat-alat atau fasilitas produksi seperti membeli lahan, membuka pabrik-pabrik, mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan baku, dan sebagainya (Rahajeng, 2016).

Pasar yang kompetitif dan efisien membuat perusahaan-perusahaan mencari alternatif untuk dapat berproduksi lebih efisien. Jika penerapan FTA berarti proses produksi yang lebih efisien, maka wilayah tersebut akan menarik FDI (*Foreign Direct Investment*) yang ditujukan untuk ekspor ke luar kawasan. FTA juga mempunyai dampak *investment diversion effect* yaitu mengalihkan FDI dari negara non-anggota ke negara anggota (Urata, 2002). Hal seperti ini terjadi ketika industri tekstil dan elektronik berpindah dari Asia Tenggara ke Meksiko akibat dari NAFTA (*North American Trade Area*).

Menurut Baldwin (2014), kehadiran FTA membantu menghubungkan sektor manufaktur suatu negara dengan jaringan produksi global dengan menarik perusahaan multinasional untuk mendirikan pabrik guna melakukan tugas/proses tertentu (Athukorala, 2019). FTA menjadi sebuah fasilitas bagi perusahaan multinasional untuk mendirikan sekaligus menanamkan investasi. Faktor kemudahan yang ditawarkan FTA membuat pasar sebuah negara menjadi semakin menarik bagi para investor/perusahaan luar negeri untuk berinvestasi.

Melalui konsep FTA ini, dipaparkan bahwa sebuah perjanjian perdagangan bebas hadir dengan tujuan meningkatkan perdagangan dan investasi bagi para negara anggotanya. Hal ini dilakukan dengan mengurangi hingga menghapus hambatan-hambatan perdagangan dan investasi, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif. Konsep ini kemudian menjadi landasan penulis dalam melihat dampak AHKFTA dengan melihat peningkatan yang terjadi pada perdagangan Indonesia – Hong Kong dan investasi Hong Kong yang masuk ke Indonesia. Lebih spesifik, konsepsi Urata (2002) mengenai *Trade creation effect* dan *investment diversion effect* sebagai dampak sebuah FTA akan membantu penulis dalam menganalisis dampak AHKFTA bagi perdagangan dan investasi di Indonesia.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini, akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian yang serupa. Pemamaparan ini dimaksudkan untuk memberikan referensi serupa dengan penelitian yang dilakukan, dan untuk memperjelas pembeda dari penelitian ini dengan penelitian lain yang serupa. Penelitian yang dipaparkan akan berfokus pada gambaran mengenai dampak yang dihasilkan dari

diberlakukannya *Free Trade Agreement* (FTA) terhadap negara-negara yang ikut di dalam FTA. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

**1. Dampak Implementasi Japan-Switzerland *Free Trade and Economic Partnership Agreement* (JSFTEPA) Terhadap Perdagangan Bilateral Antara Jepang dan Swiss Periode 2010-2015** oleh Ananta Cipta Mangunsong, 2017

Penelitian yang dilakukan oleh Mangunsong ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai dampak dari implementasi JSFTEPA terhadap perdagangan bilateral Jepang dengan Swiss pada periode 2010-2015. Mangunsong menggunakan konsep *Free Trade Agreement* (FTA) untuk menjelaskan mengenai fenomena dari objek penelitian yang ia ambil. Lebih lanjut, Mangunsong juga menggunakan konsep mengenai keunggulan komparatif guna melihat spesialisasi yang dilakukan oleh Jepang dan Swiss untuk mengoptimalkan pelaksanaan perdagangan antara kedua negara.

Pada penelitian ini, hipotesa awal yang diberikan yakni pembentukan JSFTEPA telah meningkatkan volume perdagangan antara Jepang dan Swiss, dan menuntun kedua negara untuk melakukan spesialisasi terhadap jenis komoditas yang diperdagangkan kedua negara. Secara umum, perdagangan bebas bertujuan untuk meningkatkan peredaran arus barang dalam perdagangan internasional, sehingga siapapun dapat melakukan transaksi tanpa adanya campur tangan atau intervensi dari pemerintah kecuali hal-hal yang bersifat mendukung atau fasilitatif (Mangunsong, 2017).

Penelitian ini menghasilkan analisa bahwa perjanjian JSFTEPA telah membawa perubahan positif dalam perdagangan antara kedua negara. Meskipun demikian, analisis menunjukkan bahwa belum terjadi peningkatan signifikan dalam perdagangan bilateral setelah perjanjian diberlakukan. Namun, terdapat peningkatan ekspor Swiss ke Jepang dalam kategori produk yang terpengaruh sepenuhnya oleh JSFTEPA. Implementasi JSFTEPA menunjukkan bahwa para eksportir Jepang berhasil memanfaatkan perjanjian ini dengan baik, terutama para eksportir otomotif Jepang ke Swiss. Bagi Swiss, JSFTEPA membawa dampak signifikan bagi eksportir produk makanan Swiss terutama produk keju, coklat, dan kopi. Meskipun demikian, terdapat penurunan nilai ekspor Jepang terhadap Swiss sejak tahun 2012, terutama setelah bencana gempa dan tsunami pada tahun 2011. Meskipun demikian, penerapan JSFTEPA membawa peningkatan pada nilai perdagangan antara kedua negara dan mempengaruhi spesialisasi perdagangan antara Jepang dan Swiss.

**2. Perkiraan Dampak ASEAN dan Hong Kong *Free Trade Area* (AHKFTA) Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia** oleh Dian Dwi Laksani dan Aziza Rahmaniari Salam, 2016

Penelitian ini menggunakan metode *Computable General Equilibrium* (CGE) dengan data *Global Trade Analysis Project* (GTAP) dari Purdue University. Secara garis besar, penelitian ini melakukan sebuah simulasi penurunan tarif 50% dan 100% untuk melihat keuntungan yang didapatkan oleh setiap pihak. Melalui simulasi, hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa negara—negara di ASEAN terkena dampak yang berbeda-beda, entah itu

dalam penurunan tarif 50% ataupun liberalisasi penuh (100%). Secara khusus, Indonesia sendiri, melalui simulasi pada penelitian, akan mendapatkan keuntungan jika liberalisasi yang dilakukan 100% (penuh) dibandingkan dengan hanya 50% (Laksani & Salam, 2016).

Hasil simulasi menunjukkan bahwa Indonesia memperoleh manfaat dari liberalisasi penuh perdagangan FTA ASEAN - Hong Kong baik dari kesejahteraan maupun peningkatan GDP. Meskipun demikian, peningkatan output hanya terjadi di beberapa sektor yang merupakan komoditi unggulan. Penurunan tarif secara bertahap, pemberlakuan proteksi, dan peningkatan daya saing bagi sektor yang berdaya saing rendah merupakan kebijakan yang sangat diperlukan. Tulisan ini juga membahas data perdagangan antara Indonesia dan Hong Kong, serta dampak FTA ASEAN - Hong Kong terhadap kesejahteraan, GDP, dan neraca perdagangan Indonesia. Terdapat analisis mengenai struktur ekspor Indonesia ke dunia dan kecocokannya dengan struktur impor Hong Kong dari dunia. Dampak FTA ASEAN - Hong Kong terhadap kesejahteraan menunjukkan peningkatan GDP riil di beberapa sektor komoditi unggulan ekspor Indonesia, namun juga menunjukkan dampak negatif terhadap GDP riil dan neraca perdagangan Indonesia.

**3. ASEAN-Kanada Free Trade Agreement (FTA): Peluang Bagi Indonesia** oleh Steven Raja Ingot dan Dian Dwi Laksani

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung manfaat makro ekonomi ASEAN-Kanada FTA bagi perekonomian Indonesia. Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas pasar produk-produk ASEAN khususnya Indonesia ke pasar

Kanada (Ingot & Laksani, 2019). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Multi-Region Computable General Equilibrium (CGE)*. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menghitung seberapa besar manfaat berlakunya perjanjian perdagangan barang ASEAN-Kanada FTA terhadap kinerja perdagangan Indonesia, dimana analisis ini memproyeksikan dampak ekonomi ketika berlakunya ASEAN-Kanada FTA.

Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa FTA ASEAN-Kanada dapat memberikan dampak positif, khususnya melalui pengurangan tindakan non-tarif (NTMs) dan peningkatan fasilitasi perdagangan. Simulasi menunjukkan bahwa Indonesia mungkin memperoleh keuntungan yang relatif lebih kecil dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Namun, Kamboja diproyeksikan akan mendapatkan keuntungan terbesar dalam hal investasi dan PDB riil. Studi ini menyarankan agar Indonesia fokus pada peningkatan logistik dan pengurangan hambatan non-tarif agar dapat memperoleh manfaat penuh dari skema perdagangan. Selain itu, transfer teknologi dari Kanada dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di sektor Indonesia.

**4. *Australia's New Free Trade Agreements with Japan and South Korea: Potential Economic and Environmental Impacts*** oleh Mahinda Siriwardana, 2015

Penelitian ini menganalisis dampak dari dua perjanjian perdagangan bebas yang baru-baru ini diimplementasikan oleh Australia dengan Jepang dan Korea Selatan. Penelitian ini mensimulasikan model keseimbangan umum

global GTAP-E dengan dua skenario yang berbeda. Pertama, melalui skenario perdagangan bebas dimana tarif perdagangan dihapuskan antara Jepang, Australia, dan Korea Selatan. Kedua, skenario perdagangan ramah lingkungan yang dimana skema perdagangan bebas dilaksanakan namun dilengkapi dengan kebijakan lingkungan melalui *Emmissions Trading Scheme (ETS)*.

Hasilnya, dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga negara akan mendapatkan keuntungan dengan menghapus proteksi perdagangan bilateral. Kedua FTA cenderung meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) riil dan kesejahteraan di Australia, Jepang, dan Korea Selatan (Siriwardana, 2015). Bagi Australia, keuntungan nyata diperoleh melalui peningkatan akses pasar ke Jepang dan Korea Selatan untuk mengekspor lebih banyak produk pertanian dan makanan. Meski demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ETS merupakan solusi yang mahal bagi antara Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Hal ini dikarenakan ketiga negara tersebut tampaknya kehilangan keunggulan kompetitif karena tingginya biaya perizinan dan oleh karena itu ETS bukanlah usulan kebijakan yang layak secara ekonomi untuk memitigasi peningkatan emisi dalam kasus ini.

**5. A Sectoral Impact Analysis of the ASEAN - India Free Trade Agreement** oleh Smitha Francis, 2011

Artikel ini memberikan gambaran umum mengenai pola perdagangan India, termasuk meningkatnya integrasi dengan negara-negara Asia dan komposisi ekspor dan impor global India. Artikel ini juga membahas dampak dari komitmen penurunan tarif di bawah ASEAN – India *Free Trade Agreement*

(AIFTA) untuk sektor pertanian dan non-pertanian India. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah analisis sektoral dari dampak AIFTA terhadap perdagangan bilateral antara India dan negara-negara ASEAN. Analisis ini melibatkan penelitian terperinci terhadap tarif impor, sektor ekspor utama India ke negara-negara ASEAN, dan dampak potensial dari liberalisasi perdagangan terhadap sektor pertanian, manufaktur, dan jasa.

Hasil analisis dari artikel ini menunjukkan bahwa ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor ekonomi India, terutama dalam hal akses pasar, tarif impor, dan integrasi dalam jaringan produksi regional. Dampaknya mencakup peningkatan akses pasar bagi produk pertanian dan manufaktur ringan India di negara-negara ASEAN, namun juga dapat berdampak negatif pada sektor pertanian India juga usaha kecil dan menengah. Penurunan dan penghapusan tarif berdasarkan AIFTA tidak hanya akan mengganggu pasar domestik petani, namun juga mengurangi daya tawar mereka dan menyebabkan jatuhnya harga domestik karena meningkatnya pasokan produk dan semi-produk yang berkaitan dengan pertanian (Francis, 2011). Selain itu, perjanjian ini juga dapat mendorong integrasi India dalam jaringan produksi regional, terutama dalam sektor transportasi, mesin, kimia, dan besi baja. Namun, perjanjian ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait dengan pengabaian kebutuhan pembangunan pertanian domestik dan basis manufaktur India, yang dapat membuat masalah ketenagakerjaan dan mata pencaharian di India semakin rumit.

Setelah pemaparan 5 penelitian sebelumnya di atas, penelitian ini mengambil posisi yang berbeda dalam menganalisis mengenai perjanjian kerja sama perdagangan bebas. Pada penelitian ini, pemaparan tidak hanya melihat data mengenai nilai perdagangan dan investasi antara negara anggota perjanjian perdagangan bebas saja. Penelitian ini memberikan pemaparan mengenai kebijakan dan strategi dalam meningkatkan nilai perdagangan dan investasi sebagai lanjutan dari pemanfaatan fasilitas kerja sama perdagangan yakni AHKFTA. Pemaparan dan analisis ini dilakukan dengan menggunakan konsep diplomasi ekonomi. Selain itu, perbedaan pada penelitian ini juga terletak pada batasan waktu objek penelitian, dimana penelitian ini melihat dan menganalisis mengenai nilai perdagangan dan investasi ke Indonesia setelah diberlakukannya AHKFTA yakni pada 2020-2023.